

## ABSTRAK

Di Indonesia terdapat berbagai macam organisasi nirlaba yang berorientasi pada kepentingan tertentu, salah satunya adalah organisasi keagamaan. Dalam perkembangannya, organisasi nirlaba dituntut untuk memenuhi akuntabilitas publik yang terkait perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Karakteristik utama dari organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis yaitu perbedaan tujuan, perbedaan transaksi dan perbedaan perlakuan akuntansi.

Subjek penelitian adalah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang keagamaan yaitu Gereja Katolik Roh Kudus. Alasan berdirinya organisasi ini adalah untuk menyediakan layanan yang bersifat sosial sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Meskipun tujuan utamanya adalah melayani umat, namun bukan berarti organisasi keagamaan ini tidak memiliki tujuan keuangan. Sesuai dengan sasaran penerapan PSAK 45 dengan karakteristik bahwa sumber daya sebagian berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan pengembalian manfaat ekonomi, pertanggungjawaban manajemen merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen Gereja Roh Kudus.

Selama ini Gereja Roh Kudus membuat laporan keuangan hanya sebatas pada arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar, namun penyusunan tersebut belum sesuai dengan PSAK 45 yang mengisyaratkan untuk membuat laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Aktivitas, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Oleh karena itu tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membantu organisasi nirlaba, khususnya Gereja Roh Kudus untuk lebih mengenal dan menerapkan PSAK 45 mengenai Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dalam perlakuan arus dana yang ada dalam organisasi tersebut. Metode yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menerapkan teori yang ada, kemudian diaplikasikan/dibandingkan dengan keadaan yang sudah diterapkan dalam Gereja Roh Kudus untuk kemudian didapatkan perbedaannya. Sehingga dari perbedaan tersebut nantinya akan dapat diberikan rekomendasi yang diperlukan dalam rangka penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45.

Meskipun karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis, namun penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45 diperlukan agar akuntabilitas dan transparansi organisasi dapat terlihat dan memperkuat kepercayaan publik.